

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

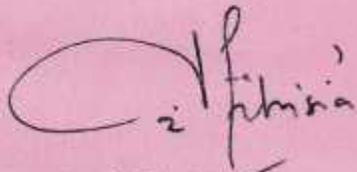
**PEMBANGUNAN KABUPATEN DHARMASRAYA PASCA
PEMEKARAN (2004-2014)**

Nama : Ria Enelia
BP/NIM : 2010/55205
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 25 Januari 2016

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Azmi Fitriasia, Ph. D
NIP. 19710308 199702 2 001

Pembimbing II



Drs. Zul Asri, M. Hum
NIP. 19600603 198602 1 001

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan Sejarah



Dr. Erniwati, SS, M. Hum
NIP. 19710406 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

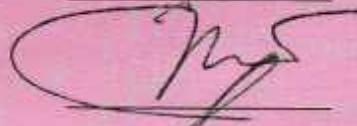
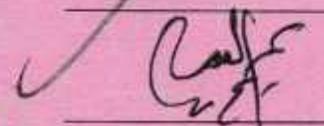
**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Senin, 25 Januari 2016**

**PEMBANGUNAN KABUPATEN DHARMASRAYA PASCA
PEMEKARAN (2004-2014)**

**Nama : Ria Enelia
BP/NIM : 2010/55205
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial**

Padang, 25 Januari 2016

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Azmi Fitriisia, Ph. D	
2. Sekretaris	: Drs. Zul Asri, M. Hum	
3. Anggota	: Dr. Erniwati, SS, M. Hum	
	Hendra Naldi, SS, M. Hum	
	Abdul Salam, S. Ag, M.Hum	

ABSTRAK

Ria Enelia (55205/2010). Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Pasca Pemekaran (2004-2014) (Skripsi) Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini mengkaji tentang pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya pasca pemekaran (2004-2014). Hal ini karena telah terjadi ketidakmerataan pembangunan sebelum pemekaran. Pembangunan yang mencakup pembangunan fisik (sarana pendidikan, kesehatan, jaringan transportasi dan prasarana lainnya) serta perkembangan perekonomian (berkaitan dengan sektor pertanian dan perkebunan) Kabupaten Dharmasraya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembangunan Kabupaten Dharmasraya secara fisik serta pertumbuhan perekonomian Kabupaten Dharmasraya pasca pemekaran (2004-2014).

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian sejarah pembangunan Kabupaten Dharmasraya dengan memanfaatkan data-data dari berbagai sumber, yaitu sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis berupa arsip-arsip pemerintahan yang diperoleh dari kantor Tata Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya (BPS). Data ini juga diperkuat dengan data lisan, dalam bentuk wawancara dengan informan sebanyak 10 orang, seperti tokoh-tokoh masyarakat, Mahasiswa, PNS, karyawan bagian Tata Pemerintahan, Bappeda dan BPS.

Dari hasil penelitian ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa kondisi Kabupaten Dharmasraya mengalami perkembangan secara fisik dan perekonomian setelah memisahkan diri dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Kondisi pembangunan fisik Kabupaten Dharmasraya pasca pemekaran pada tahun 2004 mengalami perkembangan secara kuantitas. Dapat dikatakan adanya pembangunan sarana pendidikan (gedung-gedung Sekolah dan Perguruan Tinggi), sarana kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas), dan gedung instansi pemerintahan lainnya seperti Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor BPS, GOR dan kantor-kantor lainnya. Begitu juga dengan kondisi perekonomian daerahnya yang telah mengalami pertumbuhan. Potensi perekonomian Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat dari beberapa sektor, yaitu sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata. Namun, sampai saat ini sektor yang paling berpengaruh besar terhadap perekonomian Kabupaten Dharmasraya adalah sektor pertanian dan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit dan karet.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Pasca Pemekaran (2004-2014)”**. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selain itu penulisan skripsi ini juga untuk menambah pengetahuan dan bekal bagi penulis sebagai calon tenaga pendidik.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi, tetapi dengan dukungan berbagai pihak, semua tantangan dan hambatan tersebut dapat penulis atasi. Pada kesempatan ini penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Azmi Fitriasia, Ph.D sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. Zul Asri, M. Hum sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan kesabaran dalam membimbing penulis selama menyusun skripsi ini.
2. Ibu Dr. Erniwati, M. Hum, Bapak Hendra Naldi, SS, M.Hum dan Abdul Salam, S. Ag, M. Hum selaku pembahas dan penguji yang telah meluangkan waktu, memberi masukan, bimbingan, saran-saran, arahan dan koreksi selama penulisan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Erniwati, M. Hum selaku Ketua Jurusan Sejarah dan Bapak Dr. Ofianto selaku Sekretaris Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang atas bantuan dan arahan yang telah beliau berikan.
4. Orang tua tercinta Ayahanda (Puji) dan Ibunda (Ernis Nengsih) serta adik-adik (Riski, Haripin, dan Rani) yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu narasumber yang telah dengan senang hati diganggu aktivitasnya, untuk memberikan data-data dalam cerita yang sangat membantu dalam memberikan sumber primer penulisan skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bimbingan dan dukungan tersebut dapat menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Januari 2016
Penulis

Ria Enelia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR DIAGRAM	ix
DAFTAR BAGAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	17
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA	
A. Kondisi Geografis dan Penduduk	20
B. Pemerintahan	28
C. Ekonomi dan Mata Pencarian	31
D. Dharmasraya Sebelum Pemekaran	39

**BAB III PEMBANGUNAN DAN PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN DHARMASRAYA (2004-2014)**

A. Pembangunan Sarana dan Prasaran	44
1. Pendidikan	44
2. Kesehatan	63
3. Jaringan Transportasi (Pembangunan Jalan dan Jembatan)	69
4. Fasilitas Pasar	72
5. Pembangunan Perumahan	74
6. Bangunan Produktif	76
B. Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Dharmasraya	78
1. Pertanian dan Perkebunan	78
2. Pertambangan	84
3. Perdagangan dan Jasa	88
4. Industri	89
5. Pariwisata	92
BAB IV PENUTUP	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Perkembangan jumlah dan persebaran penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2004-2013	23
2. Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan umur tahun 2013	26
3. Kecamatan, Nagari dan Jorong di Kabupaten Dharmasraya	29
4. Luas dan produksi perkebunan dan pertanian Kabupaten Dharmasraya tahun 2013	34
5. Jumlah Sekolah Dasar (SD) di setiap Kecamatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2004-2013	47
6. Jumlah Sekolah SLTP di setiap Kecamatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2004-2013	48
7. Jumlah Sekolah SLTP di setiap Kecamatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2004-2013	58
8. Tingkat pendidikan dan jumlah sekolah Kabupaten Dharmasraya tahun 2014	62
9. Jumlah dosen dan mahasiswa Perguruan Tinggi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009-2013	63

10. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2004-2013	69
11. Panjang jalan dan jenis permukaan jalan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2004-2013	71
12. Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2004- 2013	72
13. Banyak dan panjang jembatan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2004-2013	73
14. Luas panen produksi padi di Kabupaten Dharmasraya tahun 2004-2013	81
15. Luas panen dan produksi tanaman palawija menurut jenis tanaman Kabupaten Dharmasraya tahun 2004-2013	82
16. Luas dan produksi perkebunan rakyat menurut komoditi Kabupaten Dharmasraya tahun 2004-2013	84
17. Luas dan produksi komoditi kelapa sawit dan karet di Kabupaten Dharmasraya tahun 2004-2013	85
18. Perusahaan swasta pabrik pengolahan hasil sawit di Kabupaten Dharmasraya tahun 2010	86
19. Potensi bahan galian di Kabupaten Dharmasraya	88

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Hal
1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2007-2013	33
2. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya sektor pertanian dan perkebunan	80

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Hal
1. Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Kecamatan	21
2. Jumlah kepadatan penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2004-2013	25
3. Jumlah murid Sekolah Dasar (SD) di setiap Kecamatan tahun 2004-2008	51
4. Jumlah murid Sekolah Dasar (SD) di setiap Kecamatan tahun 2009-2013	51
5. Jumlah murid sekolah SLTP di setiap Kecamatan tahun 2004-2008	52
6. Jumlah murid sekolah SLTP di setiap Kecamatan tahun 2009-2013	53
7. Jumlah murid sekolah SLTA di setiap Kecamatan tahun 2004-2008	54
8. Jumlah murid sekolah SLTA di setiap Kecamatan tahun 2009-2013	55
9. Jumlah guru Sekolah Dasar (SD) di setiap Kecamatan tahun 2004-2008 ..	56
10. Jumlah guru Sekolah Dasar (SD) di setiap Kecamatan tahun 2009-2013 ..	56
11. Jumlah guru Sekolah SLTP di setiap Kecamatan tahun 2004-2008	58
12. Jumlah guru Sekolah SLTP di setiap Kecamatan tahun 2009-2013	58
13. Jumlah guru Sekolah SLTA di setiap Kecamatan tahun 2004-2008	59
14. Jumlah guru Sekolah SLTA di setiap Kecamatan tahun 2004-2008	62

15. Jumlah puskesmas di setiap Kecamatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2004-2008	65
16. Jumlah puskesmas dan rumah sakit di setiap Kecamatan	66
17. Jumlah puskesmas keliling dan pembantu di setiap kecamatan tahun 2004-2008	67
18. Jumlah puskesmas keliling dan pembantu di setiap kecamatan tahun 2009-2013	68

DAFTAR BAGAN

Bagan	Hal
1. Sistem pemasaran karet dan kelapa sawit	36

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta pembangunan. Pembangunan juga dapat dipahami sebagai serangkaian upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat melalui langkah pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah, pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat.

Perkembangan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan populasi penduduk yang cepat, bertambah banyaknya bangunan-bangunan seperti gedung pemerintahan, pemukiman penduduk, bangunan perkantoran, serta pembangunan sarana dan prasarana seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu salah satu tujuan pembangunan secara makro adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta masyarakat hendaknya berpartisipasi dengan menggunakan sumberdaya yang ada dan mampu menaksir

potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.¹

Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Pembentukan, pemekaran dan pembangunan dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Pembentukan daerah otonom harus mempertimbangkan berbagai macam faktor, antara lain faktor ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk dan pertimbangan sosial aspek politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah ini dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya dan diberikannya otonomi daerah.²

Tujuan pemekaran daerah selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan pemerintah, juga untuk melaksanakan pemerintahan setingkat Kabupaten (Daerah Tingkat II) secara otonom dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Tujuan utama pemekaran Kabupaten Dharmasraya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

¹Lincoln, Arsyad, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE, Yogyakarta. Hal. 298

²Rozali Abdullah, 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*. (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada), Hal. 16-17

melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah dan pengelolaan potensi daerah Kabupaten Dharmasraya.

Kabupaten Dharmasraya adalah merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004. Pada awal pemekaran (tahun 2003), Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 4 kecamatan yaitu Pulau Punjung, Sungai Rumbai, Koto Baru dan Sitiung dengan 21 nagari dan 109 jorong.

Pada tahun 2009 berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya No. 3 tahun 2008 tentang penataan dan pembentukan kecamatan, jumlah kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dimekarkan menjadi 11 kecamatan. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan nagari terdapat sebanyak 48 nagari. Pada Tahun 2009 dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan nagari. Dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat beberapa nagari yang dimekarkan, dari 48 nagari menjadi 52 nagari dan dengan 260 jorong.

Pembentukan suatu daerah harus memperhatikan berbagai aspek pendukung pengembangan daerah terutama aspek sumberdaya alam (sumber ekonomi suatu daerah) dan sumberdaya manusia. Apabila salah satu aspek tersebut tidak dimiliki akan menghambat tujuan utama pembentukan daerah yaitu peningkatan kesejahteraan dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pasca terbentuknya daerah otonom, terdapat peluang besar dalam pembangunan ekonomi di wilayah yang baru diberi status daerah otonomi dengan pemerintahan sendiri. Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan sumber daya alam yang besar di Sumatera Barat. Posisi geografis wilayah yaitu termasuk kedalam kawasan hulu sampai tengah DAS batang hari yang dibatasi bukit barisan yang membentang pada arah barat, menyebabkan besarnya peluang pengembangan sumber daya alam Kabupaten Dharmasraya.

Berbagai potensi alam untuk mengangkat ataupun menjadikan ciri khusus daerah otonom. Komoditi unggulan seperti sawit, karet, padi, kakao, dan peternakan. Berdasarkan potensi tersebut, maka sebagian besar kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Dharmasraya bergerak pada sektor pertanian, baik itu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan terutama perkebunan karet dan sawit. Perkebunan sawit dan karet merupakan sektor unggulan Kabupaten Dharmasraya.

Selain perkebunan dan pertanian Kabupaten Dharmasraya juga memiliki potensi sumber daya alam lainnya yaitu pertambangan di antaranya batu bara, emas, biji besi, pasir, dan batu gunung yang sudah mulai dikembangkan saat ini. Kabupaten

Dharmasraya juga mempunyai objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan, apabila dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan pendapatan untuk daerah maupun masyarakat. Diantaranya Bendungan Batu Bakawik, Air Terjun Timbulun, Candi Padang Roco, Kerajaan Siguntur, Mesjid Tuo, dan Bendungan Batang Mimpi. Pengelolaan wisata di Kabupaten Dharmasraya dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Dharmasraya pada sektor pariwisata. Lingkup kegiatan ekonomi lainnya yaitu industri rumah tangga yang tersebar hampir di setiap nagari yang ada. Jenis industri ini merupakan industri kecil (makan) seperti industri tahu dan tempe.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak pembangunan Kabupaten Dharmasraya. Bukan hanya pembangunan infrastruktur pemerintahan tetapi infrastruktur fisik yang menyertai. Pembangunan daerah di bidang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang tercermin pada pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, bangunan produktif, dan sarana perdagangan.

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan masyarakat dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan. Dari tahun ke tahun pendidikan di Kabupaten Dharmasraya mengalami kemajuan yang signifikan. Perubahan pada pola pikir mendorong kebutuhan akan pendidikan meningkat pada masyarakat, pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga telah menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang dalam dunia pendidikan.

Selain kualitas Pendidikan, hal yang terpenting lainnya adalah kesehatan. Kabupaten Dharmasraya memiliki fasilitas kesehatan seperti, Puskesmas sebagai sarana kesehatan atau unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan/desa/nagari. Sarana transportasi seperti pembangunan jalan dan jembatan terus ditambah dan diperbaiki. Jalan yang dulunya tanah sekarang sudah diaspal, jalan yang menghubungkan antar kecamatan dan jorong sekarang telah mulai ditambah.

Meskipun merupakan Kabupaten yang muda dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, namun produktivitas perekonomiannya menggambarkan kemajuan. Kabupaten Dharmasraya terus mengalami peningkatan baik dari segi aspek sumber daya alam maupun sumber daya manusia setiap tahunnya. Peningkatan tersebut berdampak pada laju pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan topik **“Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Pasca Pemekaran (2004-2014).”**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah dan Temporal Kajian

Penelitian ini difokuskan pada pembangunan Kabupaten Dharmasraya secara fisik dan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Dharmasraya pasca pemekaran. Batasan waktu (temporal) mengambil periode dari tahun (2004-2014), karena ditahun 2004 Kabupaten Dharmasraya resmi memisahkan diri dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan membentuk Kabupaten sendiri.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah pembangunan Kabupaten Dharmasraya secara fisik pasca pemekaran (2004-2014)?
- b. Bagaimanakah perkembangan perekonomian Kabupaten Dharmasraya pasca pemekaran (2004-2014)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan pembangunan Kabupaten Dharmasraya secara fisik pasca pemekaran (2004-2014)
- b. Menjelaskan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Dharmasraya pasca pemekaran (2004-2014)

2. Manfaat Penelitian

a. Akademis

Tulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya yang berkenaan dengan bidang perencanaan pembangunan wilayah.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran, masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam merancang kebijakan dan strategi yang dirasa perlu bagi upaya pelaksanaan dan perencanaan pembangunan wilayah.

D. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konseptual

1. Studi Relevan

Beberapa karya yang relevan dalam penelitian ini adalah *pertama*, Perkembangan Solok Selatan (1969-2003) oleh Fitri Dewi (2005), yang mengkaji tentang perkembangan Solok Selatan sejak dari awal Pelita Pertama 1969-2003. Pembangunan yang ada di Solok Selatan terabaikan oleh pemerintah. Solok Selatan yang merupakan bagian dari daerah Solok yang luasnya merupakan nomor dua terluas di Sumatera Barat dengan luas daerah 7.121,2 km. Luasnya daerah inilah yang menyebabkan pembangunan Kota Solok Selatan terabaikan. Semenjak dilaksanakannya pembangunan jangka panjang pertama tahun 1969 sampai tahun 2003 Solok Selatan sangat lamban dalam pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan perkembangan Solok Selatan selama dalam periode (1969-2003).³

Kedua, Sejarah Pemekaran Pasaman oleh Dedi Dasrianto (2010), skripsi ini mengkaji tentang proses pemekaran Pasaman mengalami proses yang panjang. Ide tentang pemekaran telah ada semenjak dulu namun mengalami pasang surut seperti: PRRI tahun 70-an dan tahun 1999, namun mengalami kegagalan dalam prosesnya, euforia reformasi merupakan salah satu momen yang dimanfaatkan dalam mempercepat proses pemekaran ini. Usaha ini baru berhasil tahun 2003 dengan dibentuknya badan pekerja pemekaran Pasaman. Hal lain yang perlu dicermati adalah setelah pemekaran, Kabupaten Pasaman harus berbenah mengembangkan potensi

³Fitri, Dewi, 2005. "Perkembangan Solok Selatan (1969-2003)", *Skripsi*, (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Ilmu Sosial UNP)

yang ada, menghilangkan anggapan bahwa Pasaman tergantung pada wilayah Pasaman Barat sebagai daerah kaya SDA penyumbang PDA bagi Kabupaten Pasaman sebelum pemekaran.⁴

Ketiga, Dampak Pemekaran Wilayah dalam Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat oleh Eva Susila (2006), Kabupaten Pasaman Barat merupakan kabupaten baru yang dibentuk berdasarkan UU No. 38 Tahun 2003 telah memekarkan diri dan lepas dari Kabupaten Pasaman tanggal 7 Januari 2004. Pembentukan Pasaman Barat dilakukan dengan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya. Terbentuknya Pasaman Barat ini tidak terlepas dari proses dan langkah-langkah yang ditempuh sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 129 tahun 2000 pada pasal 1 ayat 1 dampak dari pemekaran daerah dilihat dari: (1) pelayanan, (2) pemberdayaan Masyarakat, (3) pembangunan.⁵

Keempat, Dari Wilayah Pembantu Bupati Sijunjung Bagian Selatan Menjadi Kabupaten Dharmasraya: Studi tentang Sosial Ekonomi (1985-2010), oleh Suwarni menunjukkan bahwa perubahan status pemerintahan dari wilayah pembantu Bupati Kabupaten Sawahlunto Sijunjung bagian Selatan menjadi Kabupaten Dharmasraya akibat dari ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan administrasi pemerintahan dan

⁴Dedi, Desrianto, 2010. "Sejarah Pemekaran Pasaman", *Skripsi*, (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Ilmu Sosial UNP)

⁵Eva, Susila, 2007. "Dampak Pemekaran Wilayah dalam Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat", *Skripsi*, (Padang: Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Ilmu Sosial UNP)

terjadinya ketimpangan dalam pembangunan antar wilayah utara dan selatan. Kondisi kehidupan sosial masyarakat sebelum dan sesudah menjadi Kabupaten Dharmasraya dapat dibagi dalam 3 periode yaitu, 1) Kehidupan Sosial Ekonomi masyarakat Wilayah Selatan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (1985-1998), dalam masa ini kehidupan ekonominya lebih terarah dalam pembangunan pertanian dan peternakan, baik dalam pembukaan lahan, pengolahan lahan maupun menikmati hasil dari lahan pertanian. 2) Masa menata kehidupan sosial pasca krisis ekonomi pasca krisis ekonomi (1999-2002), krisis ekonomi menyebabkan terjadinya penurunan harga kondisi pertanian sehingga perlu diupayakan untuk menata perekonomian. 3) Kehidupan sosial ekonomi masyarakat setelah menjadi Kabupaten Dharmasraya (2003-2010), pada ini terjadi peningkatan pendapatan membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat.⁶

Kelima, Pemekaran Wilayah di Sumatera Barat studi kasus tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya (1999-2005) oleh Nasution yang membahas tentang proses perubahan status pemerintahan dari Kabupaten Dharmasraya dan lebih memfokuskan pada administratif pemerintahannya atau sejarah pemerintahan.⁷

Perbedaan antara kajian peneliti dengan ketiga studi relevan di atas adalah, pertama Fitri Dewi (2005), yang mengkaji tentang keadaan infrastruktur daerah Kabupaten Solok Selatan periode (1969-2003). Kemudian Dedi Dasrianto (2010),

⁶Suwarni, 2007. "Dari Wilayah Pembantu Bupati Sijunjung Bagian Selatan Menjadi Kabupaten Dharmasraya: Studi tentang Sosial Ekonomi (1985-2010)", *Skripsi*, (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Ilmu Sosial UNP)

⁷Nasution, 2009. "Pemekaran Wilayah di Sumatera Barat studi kasus tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya (1999-2005)", *Skripsi*, (Padang: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas)

yang mencoba melihat proses pemekaran Kabupaten Pasaman yang mengalami proses yang panjang dan lebih menekankan pada langkah-langkah (proses) yang ditempuh oleh pemerintah dan segenap elemen masyarakat dalam merealisasikan pemekaran Kabupaten Pasaman.

Selanjutnya Eva Susila (2006), yang melihat proses pembentukan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan peraturan pemerintah. Suwarni (2012), yang melihat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Dharmasraya sebelum dan sesudah menjadi Kabupaten Dharmasraya. Kajiannya lebih menekankan pada aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya sendiri. Dan terakhir Nasution (2009), yang mengkaji mengenai proses pemekaran Kabupaten Dharmasraya atau pembentukan Kabupaten Dharmasraya.

Perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah peneliti mencoba melihat perkembangan suatu daerah berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki daerah tersebut, dari sinilah maka peneliti dapat menjelaskan bagaimana gambaran pembangunan Kabupaten Dharmasraya pasca pemekaran (2003-2013).

2. Kerangka Konseptual

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan yang direncanakan dalam pembangunan mencakup seluruh sistem sosial masyarakat mulai dari ekonomi politik, infrastruktur, pendidikan, teknologi, dan kesehatan. Pembangunan merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada, pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu

lapangan kerja dan merangsang perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Pembangunan dipahami sebagai serangkaian upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat melalui langkah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan dukungan stabilitas politik yang tinggi pula.⁸ Pembangunan mencakup perluasan dasar ekonomi dengan diverifikasi pertanian, pengembangan produksi (pertambangan, kehutanan), pengembangan industri, dan kegiatan sektor jasa-jasa serta penciptaan lapangan kerja produktif di bidang-bidang kegiatan kegiatan yang luas. Paling penting dalam proses pembangunan ialah semakin meluasnya kesempatan kerja yang bersifat produktif.

Upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Pembangunan daerah meliputi sumberdaya alam, tenaga kerja, investasi, transportasi, komunikasi, luas daerah, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat, dan bantuan-bantuan pembangunan.⁹

Pembangunan di Indonesia realisasinya terlihat dari pembangunan di wilayah atau kawasan Daerah Tingkat I sebagai provinsi dan paling utama pada kawasan Daerah Tingkat II atau Kabupaten Kota. Daerah Tingkat II menjadi ujung tombak dalam pembangunan suatu wilayah. Pelaksanaan dan perencanaan pembangunan sangat

⁸Hatta, Susanto dkk, 2000. *Menggeser Pembangunan Memperkuat Rakyat*. (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama). Hal. 11

⁹Lincoln, Arsyad, *Op. Cit.* Hal. 300

nyata terlihat. Dalam hal ini Kabupaten Dharmasraya salah satu dari Kabupaten di Sumatera Barat. Daerah yang memiliki potensi ekonomi yang baik merupakan daerah yang berpotensi dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya, Kabupaten Dharmasraya yang memiliki daerah yang kaya sumber daya alamnya.

Kabupaten merupakan gabungan dari beberapa Kecamatan yang sebagian besar daerahnya merupakan wilayah pedesaan. Kabupaten merupakan Daerah Tingkat II yang juga berarti daerah desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan (wewenang, hak, kewajiban, dan tanggung jawab) sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah otonom sehingga daerah otonom dapat melakukan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam masalah-masalah pengelolaan pembangunan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pembangunan.

Pembangunan di Kabupaten Dharmasraya dari awal terbentuknya hingga saat ini telah menunjukkan kemajuan sebagai daerah otonom, tidak hanya pembangunan infrastruktur pemerintahan tetapi infrastruktur fisik seperti sarana dan prasarana transportasi, jalan, komunikasi dan lainnya. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Dharmasraya, yang sebagian besar adalah pertanian terutama perkebunan sawit dan karet. Perkebunan dan karet merupakan sektor unggulan kabupaten Dharmasraya. Pembangunan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1) Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan indikator penting dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pendidikan menjadi komponen untuk mendukung dan mendorong pembangunan sektor lainnya.

2) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator dalam keberhasilan pembangunan.

3) Sarana dan Prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan suatu pembangunan ekonomi suatu daerah.

4) Pendapatan Penduduk

Besarnya pendapatan atau penghasilan masyarakat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

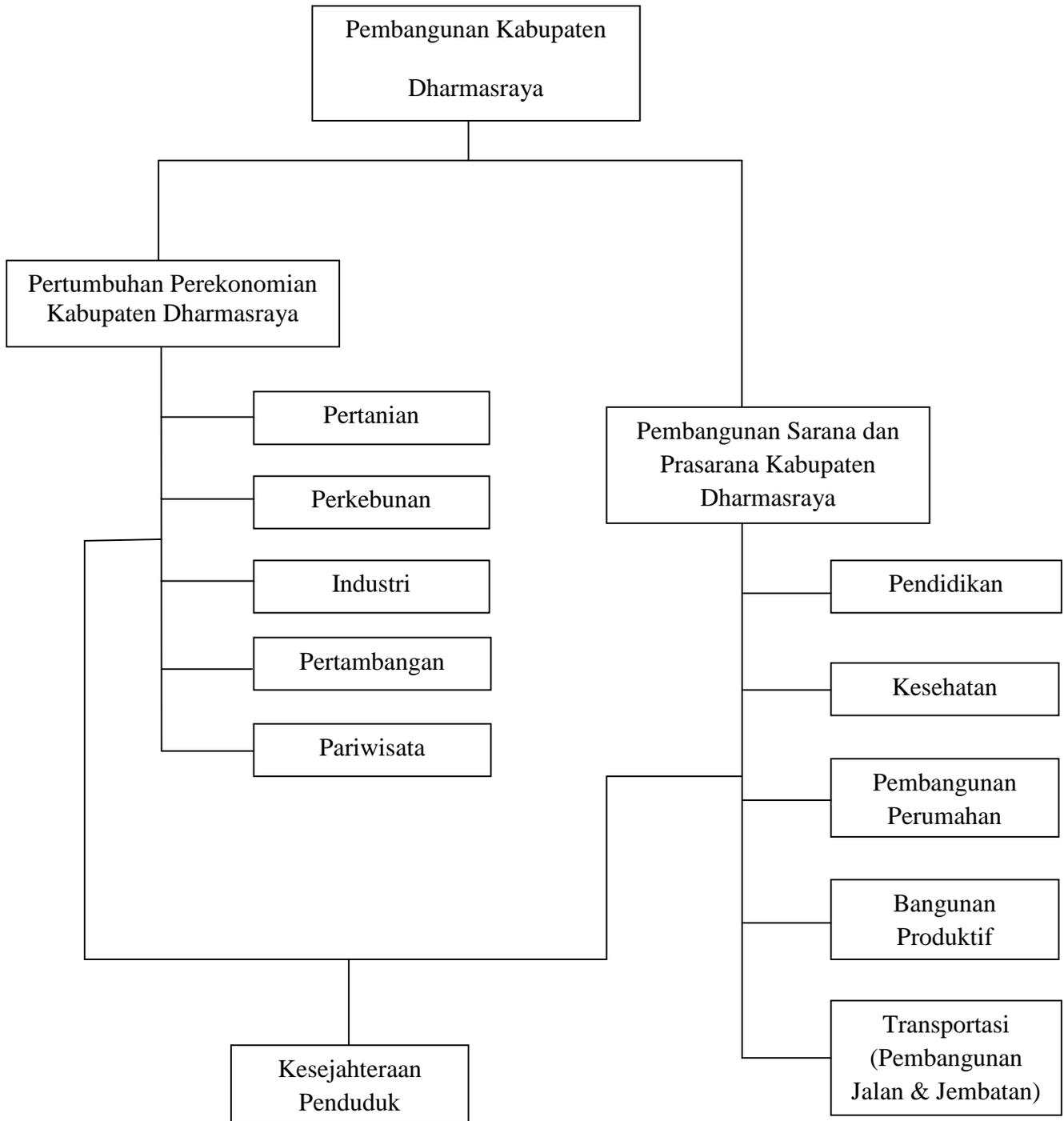
Daerah Tingkat II (kabupaten dan kota) menjadi titik berat daerah otonom.¹⁰ Kebijakan untuk meletakkan titik berat otonomi daerah pada Daerah Tingkat II didasarkan pada pertimbangan bahwa Daerah Tingkat II merupakan daerah otonomi yang lebih berhubungan dengan masyarakat, sehingga dapat diharapkan lebih mengerti dan memahami aspirasi masyarakat di daerahnya, sehingga keselarasan dan

¹⁰Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. (H.A.W. Widjaja dalam Blendina Mery, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hal. 76)

keserasian antara kegiatan pemerintah dan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat.¹¹

¹¹H.A.W. Widjaja, 1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. (PT. Rineka Cipta, Jakarta). Hal. 59

3. Kerangka Berfikir



E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses disebut historiografi (penulisan sejarah).¹²

Langkah pertama adalah heuristik yaitu mencari dan mengumpulkan data sejarah serta sumber-sumber yang relevan melalui studi kepustakaan.¹³ Studi kepustakaan untuk membantu mengumpulkan sumber-sumber yang mendukung dalam penyelesaian topik yang diteliti. Sumber-sumber dapat dikategorikan menjadi sumber primer dan sekunder.¹⁴

Sumber primer yang penulis pakai berupa arsip-arsip yang menyangkut pembangunan di Kabupaten Dharmasraya. Arsip yang digunakan merupakan dokumen pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang dapat dijadikan fakta pembangunan Kabupaten Dharmasraya. Sumber tersebut diperoleh dari arsip-arsip Kantor Bupati Kabupaten Dharmasraya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya dan perpustakaan daerah Kabupaten Dharmasraya. Langkah berikutnya mengumpulkan data sekunder yaitu berupa buku yang relevan dalam menyelesaikan topik yang diteliti di berbagai perpustakaan, diantaranya perpustakaan pusat UNP, perpustakaan FIS UNP, perpustakaan labor Sejarah UNP, perpustakaan sastra

¹²Louis Gottschalk, 1975. *Mengerti Sejarah*. (Jakarta: Yayasan Penerbit UI). Hal. 32

¹³Mestika Zed, 1999. *Metodologi Sejarah*. Padang: Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, FIS. UNP. Hal. 36

¹⁴*Ibid.* Hal. 37

UNAND, perpustakaan daerah Kabupaten Dharmasraya. Studi lapangan dilakukan wawancara terhadap pemerintah dan sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Dharmasraya dengan informan sebanyak sepuluh orang.

Langkah kedua adalah kritik sumber dengan kegiatan melakukan pengujian terhadap keaslian sumber atau keotentikan data tersebut. Dalam kritik sumber terdiri *dari kritik eksternal* maupun *kritik internal*. Kritik eksternal adalah dengan melakukan pengujian otentitas atau keaslian data. Caranya adalah dengan melihat dan memperhatikan, apakah dokumen yang diperoleh merupakan dokumen atau arsip milik pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan kritik internal dilakukan untuk menguji keabsahan informasi yang diperoleh. Kedua tingkat pengolahan ini bertujuan untuk menyeleksi dan menyingkirkan bagian-bagian data yang tidak otentik dan kemudian menyimpulkan kesaksian yang bisa dipercaya dari bagian-bagian yang telah diseleksi dari data otentik

Tahap ketiga adalah melakukan analisis, sintesis, dan interpretasi data yaitu dengan memilah sumber sejarah guna menemukan butir-butir informasi yang sesungguhnya. Dalam hal ini telah dilakukan pengelompokkan sumber berdasarkan objek yang diteliti. Setelah melakukan tahap analisis dilanjutkan dengan sintesis yaitu dengan merangkai dan menghubungkan data dengan informasi yang sudah dianalisis. Tahap analisis ini tentu melibatkan interpretasi guna merekonstruksi peristiwa yang ditulis.

Langkah terakhir adalah penulisan sejarah (Historiografi), merupakan tahap akhir dimana data yang telah melalui tiga tahap sebelumnya, kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan secara sistematis menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi.